

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien. Menurut (Hasibuan, 2007) pengelolaan atau manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan, dan pengawasan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah pengelolaan dan segala sumber daya yang ada di dalam program tersebut. Pengelolaan dana BOP yang baik mampu membantu ketercapaian tujuan program dengan efektif dan efisien. Keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOP melalui proses kerja sama yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, merupakan kunci keberhasilan. Dalam merencanakan penggunaan dana BOP, kepala sekolah terlebih dahulu harus menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan dana BOP harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOP, dewan guru, dan komite sekolah. Namun, kenyataannya, banyak sekolah yang belum memaksimalkan pemanfaatan dana BOP, dan seringkali sekolah yang sudah

menerima dana BOP masih kekurangan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.

Aturan penggunaan BOP diatur dalam (Permendikbud Nomor 4, 2019) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2019 ini mengganti Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD 2018, Latar belakang terbitnya Permendikbud Nomor 4 tahun 2019 tentang Juknis Penggunaan DAK Nonfisik BOP PAUD 2019 :

1. Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
2. Untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan peningkatan akses masyarakat terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang adil dan lebih bermutu, pemerintah mengalokasikan dana Bantuan Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini .

Permasalahan yang sering terjadi adalah dana pendidikan merupakan sumber yang paling beresiko terjadinya penyelewengan dana . Dana pendidikan seharusnya di gunakan secara efektif untuk di alokasikan pada kebutuhan lembaga pendidikan yang bersangkutan . Pentingnya unsur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pada lembaga pendidikan guna untuk mengetahui serta meminimalisir adanya penyelewengan atau

kecurangan pada dana pendidikan yang ada. Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan informasi tentang aliran dana dalam penggunaannya. Transparansi artinya adanya keterbukaan terhadap penggunaan dana yang di gunakan sehingga adanya rasa kepercayaan serta mudah mendapatkan informasi. Apabila akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan dengan baik, maka efektivitas pengelolaan dana akan terwujud dalam suatu lembaga tertentu serta pengelolaan dana dapat tercipta dengan baik pula.

Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan informasi tentang aliran dana dalam penggunaannya, sedangkan transparansi sebagaii adanya keterbukaan terhadap penggunaan dana sehingga menciptakan rasa kepercayaan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi. Jika akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan dengan baik, maka efektivitas pengelolaan dana akan terwujud dalam lembaga tersebut.

Dalam penelitian Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah pernah di lakukan oleh Tri Novita Sari Sinaga (2021) yang berjudul “Analisis Prinsip Akuntabilitas & Transparansi atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Widya Dharma Bandar Lampung” dengan hasil penelitian bahwa Penerapan Prinsip Akuntabilitas & Transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian ketidaksesuaian dalam penggunaan media digital sebagai alat untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana BOP. Banyak sekolah yang

belum optimal dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasikan dan melaporkan transaksi keuangan secara transparan. Hal ini berdampak pada kurangnya keterbukaan informasi kepada publik serta sulitnya mengakses data yang akurat dan terkini mengenai penggunaan dana BOP. Optimalisasi penggunaan media digital diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan, sehingga tujuan program BOP dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Maka berdasarkan penjabaran latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan judul penelitian “PENGARUH AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)?
3. Apakah Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah meneliti pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana

Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) pada TK di wilayah Kecamatan Jati Agung bulan April sampai dengan bulan Juni 2021

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
2. Untuk meneliti apakah transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan kemudahan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik dalam penggunaan dan pengelolaan dana pendidikan.
2. Bagi penyelenggara pendidikan umumnya dapat dijadikan acuan penggunaan dan pengelolaan dana pendidikan khususnya dana bantuan operasional penyelenggaraan
3. Bagi pemerintah (Dinas Pendidikan) penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) tentang tata kelola yang baik dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)